

Jurnal Pijar
Studi Manajemen dan Bisnis

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>

Vol. 4 No. 2, 2026, Hal. 101 - 117

ISSN 2963-0606 (Online)

ISSN 2964-9749 (Print)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo)**

Rahmat Albhi. KZ¹, Ayu Chairina Laksmi²

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia

Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, serta menguji peran transparansi sebagai variabel mediasi antara sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas. Studi ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 161 responden yang merupakan pegawai akuntansi menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, transparansi juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas serta memediasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah.

Abstract | *This study aims to analyze the effect of the implementation of the Regional Financial Accounting System on financial transparency and accountability in local government, and to examine the mediating role of transparency between the accounting system and accountability. The research was conducted at the Regional Financial Agency of Tebo Regency using a quantitative approach. Data were collected from 161 respondents who are accounting staff through purposive sampling technique. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that the implementation of the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on both transparency and accountability. Furthermore, transparency also has a positive effect on accountability and mediates the relationship between the accounting system and accountability. These findings highlight the importance of transparent and accountable regional financial management through an appropriate accounting system to enhance public trust and the quality of local government services.*

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Transparency, Accountability, Local Government.*

Alamat Korespondensi
E-mail: rahmatalbhi@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan pesat, terutama sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, akuntansi sektor publik menjadi instrumen penting guna menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sistem akuntansi yang baik mendukung terciptanya laporan keuangan berkualitas dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Sistem akuntansi keuangan daerah yang disusun berdasarkan SAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan. Dalam PP No. 24 Tahun 2005, ditegaskan pentingnya sistem akuntansi yang sesuai standar guna menunjang kualitas informasi keuangan. Kegagalan dalam penerapan standar tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan dan akuntabilitas keuangan daerah. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai wilayah hasil pemekaran sejak 1999, terus berupaya meningkatkan pengelolannya. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022, capaian indikator strategis dinilai sangat tinggi. Namun, tantangan masih muncul terkait keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan, yang memengaruhi efektivitas sistem akuntansi daerah.

Dalam laporan tersebut juga diungkapkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan perbaikan sistem serta kebijakan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan yang memadai sangat penting dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Tebo. Akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan, baik oleh DPRD, BPK, maupun masyarakat. Akuntabilitas menuntut keterbukaan dalam penyampaian hasil kebijakan dan pengelolaan keuangan publik.

Penelitian sebelumnya seperti Darwis (2020) dan Aminah et al. (2020) menguatkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah**, dengan studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan

Teori Keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik (principal) dan pengelola (agen), di mana agen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan mewakili kepentingan principal. Namun, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik (agency conflict) dan biaya keagenan (agency cost). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, konflik ini bisa terjadi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal, jika pemerintah tidak mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab (Jensen & Meckling, 2012; Suwarti, 2022).

2. Teori Stewardship

Teori Stewardship memberikan perspektif yang berbeda. Teori ini berasumsi bahwa agen (dalam hal ini pemerintah) secara alami akan bertindak demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Manajer atau aparat pemerintah bertanggung jawab menjaga integritas dan kinerja untuk mencapai tujuan kolektif. Dalam konteks sektor publik, *stewardship theory* menganggap pemerintah desa sebagai entitas yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel (Donaldson, 1989; Rizal & Hermanto, 2019).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan penggunaan sumber daya publik. Ini mencakup penyajian laporan, pengungkapan kegiatan, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah. Pemerintahan yang akuntabel mampu menyajikan informasi terbuka, memberikan layanan yang berkualitas, serta menjamin keterlibatan publik dalam pengawasan dan evaluasi (Nurkholis, 2019; Dalimunthe, 2021).

4. Transparansi

Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Transparansi memfasilitasi pengawasan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karakteristik utama transparansi adalah informatif, keterbukaan, dan pengungkapan informasi keuangan dan kinerja kepada publik (Mardiasmo, 2018; Hoesada, 2019).

5. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007, merupakan serangkaian prosedur yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem ini menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk laporan neraca, dengan sistem pembukuan berpasangan. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. SAKD berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan penerapan sistem yang baik, laporan keuangan dapat disusun sesuai standar, meminimalkan risiko kesalahan, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penerapan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan menunjukkan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Sistem yang dirancang dengan baik tidak hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Maria (2016), pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap transparansi akan semakin kuat jika informasi yang dihasilkan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* (Donaldson, 1991), yang menyatakan bahwa manajer dalam organisasi publik memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan organisasi, bukan individu. Dalam konteks ini, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mendorong pemerintah sebagai *steward* untuk menyajikan laporan yang transparan guna menghindari konflik keagenan. Penelitian sebelumnya oleh Dian dan Ida (2018), Aminah et al. (2020), dan Darwis et al. (2022) juga menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, sistem akuntansi yang diterapkan secara tepat juga memperkuat akuntabilitas, yaitu kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik secara jujur, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Akuntabilitas dapat dicapai ketika laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi dan keandalan sebagaimana diatur dalam PP 71 Tahun 2010. Stewardship theory mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa pegawai pemerintah yang termotivasi oleh tujuan organisasi akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel jika sistem akuntansi dijalankan dengan baik. Penelitian dari Lauwo et al. (2021), Aminah et al. (2020), dan Darwis et al. (2022) menguatkan bahwa sistem akuntansi berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik.

Transparansi sendiri merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan akuntabilitas. Pemerintah yang terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang bersih dan bertanggung jawab. Semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin mudah pula masyarakat dan lembaga pengawas menilai pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara principal dan agent dapat dikurangi melalui keterbukaan informasi. Transparansi menjadi alat untuk mengatasi asimetri informasi sehingga akuntabilitas dapat ditingkatkan. Penelitian dari Rios et al. (2024), Lauwo et al. (2022), serta Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, transparansi juga memainkan peran mediasi dalam hubungan antara penerapan sistem akuntansi keuangan dan akuntabilitas. Sistem akuntansi yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang transparan, dan transparansi tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Artinya, akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi secara langsung oleh sistem akuntansi, tetapi juga secara tidak langsung melalui tingkat transparansi yang dihasilkan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat diakses, dimengerti, dan dipercaya oleh publik. Dengan demikian, transparansi menjadi jembatan penting antara sistem akuntansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya memperkuat kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Dukungan empiris dari Kristiatuti (2020), Lauwo et al. (2022), dan Rios et al. (2024) memperkuat argumen bahwa sistem akuntansi yang transparan mampu meningkatkan akuntabilitas secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **H1:** Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Transparansi.
- **H2:** Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas.
- **H3:** Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas.
- **H4:** Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas melalui Transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kausalitas untuk menguji pengaruh antar variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner Google Form kepada pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Dari total 240 pegawai, ditentukan sampel sebanyak 150 responden menggunakan rumus Slovin dengan teknik purposive sampling. Kriteria responden meliputi PNS dengan masa kerja minimal dua tahun, berperan dalam penyusunan laporan keuangan, serta memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert 5 poin untuk mengukur variabel independen dan dependen. Analisis data dilakukan dengan metode PLS-SEM menggunakan aplikasi SmartPLS. Pengujian model mencakup uji

validitas, reliabilitas, serta pengujian hubungan antar variabel melalui uji t-statistik dan p-value.

HASIL

Pada subbagian ini, peneliti menyajikan temuan penelitian berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data dilakukan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dinyatakan pada bagian sebelumnya. Profil responden mencakup data geografis dan demografis, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan. Untuk melindungi privasi, nama responden dirahasiakan. Kuesioner disebarakan kepada populasi penelitian, dan total yang Kembali sebanyak 161 responden yang sesuai dengan kriteria penelitian pada penelitian ini.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-Laki	84	52,2%
Perempuan	77	47,8%
Usia		
26-35 Tahun	128	79,5%
36-45 Tahun	28	17,4%
> 46 Tahun	5	3,1%
Pendapatan		
3.500.001-4.500.000	41	25,5%
4.500.001-5.500.000	92	57,1%
5.500.001-6.500.000	23	14,3%
> 6.500.000	5	3,1%
Pendidikan		
D3	13	8,1%
S1	148	91,9%
Masa Jabatan		
1-5 Tahun	80	49,7%
6-10 Tahun	68	42,2%
> 10 Tahun	13	8,1%
	161	100%

Responden penelitian ini berjumlah 161 pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, terdiri dari 52,2% laki-laki dan 47,8% perempuan. Mayoritas berusia 26-35 tahun (79,5%), lulusan S1 (91,9%), dan memiliki masa kerja 1-10 tahun (91,9%). Sebagian besar memiliki pendapatan antara Rp4.500.001 – Rp5.500.000 (57,1%). Karakteristik ini mencerminkan profil yang produktif, terdidik, dan adaptif terhadap sistem, sehingga mendukung kredibilitas dan validitas data. Menurut Robbins dan Judge (2022), keberagaman gender memperkaya perspektif, sementara Hair et al. (2021) dan Creswell dan Creswell (2023) menekankan peran pendidikan dan pengalaman kerja dalam meningkatkan literasi serta akuntabilitas keuangan publik. Komposisi demografis ini memperkuat kualitas data dalam menilai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang menjadi sampel. Analisis ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman awal terkait permasalahan yang diteliti. Informasi mengenai statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	161	1,38	5,00	4,00	,5860
Transparansi	161	2,13	5,00	3,80	,4877
Akuntabilitas	161	1,13	4,88	3,93	,4608
Valid N (listwise)	161				

Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

- 1) Hasil deskriptif menunjukkan bahwa responden menilai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) cukup tinggi dengan rata-rata 4,00 dari skala 5, mencerminkan implementasi sistem yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2020) yang menegaskan bahwa SAKD yang baik merupakan dasar bagi tata kelola pemerintahan yang andal.
- 2) Transparansi keuangan memperoleh rata-rata 3,80, menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi publik sudah cukup berjalan, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam penyampaian data keuangan secara lebih terbuka (Rini, 2021).
- 3) Sementara itu, akuntabilitas keuangan mencatat nilai rata-rata 3,93, menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik dinilai cukup dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengindikasikan adanya sistem kontrol internal yang efektif, sebagaimana ditegaskan oleh Hair et al. (2021), bahwa akuntabilitas yang kuat mencerminkan keberadaan sistem pengawasan yang memadai di sektor publik.

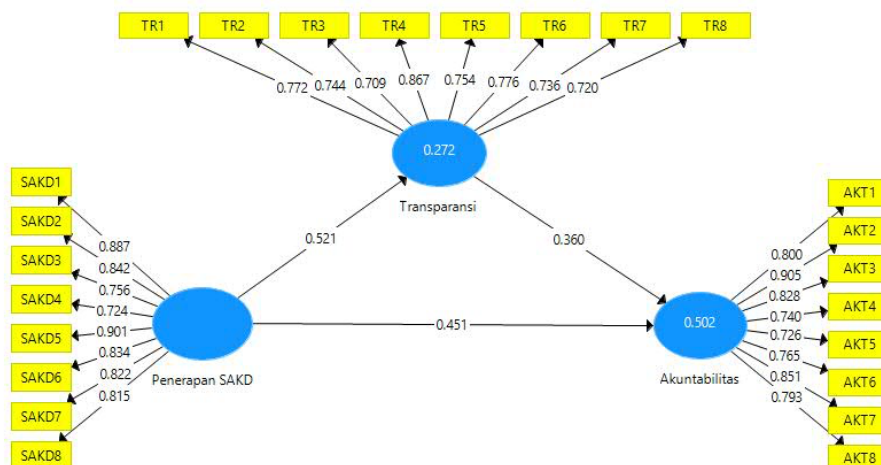
2. Hasil dan Analisis Data Penelitian

1) Model Pengukuran (Outer Model)

Dengan menerapkan indikator yang telah ditetapkan, model ini secara eksplisit menggambarkan hubungan kausal antara variabel laten, baik endogen maupun eksogen. Variabel eksogen, yang juga disebut variabel bebas atau variabel penentu, merupakan variabel yang variabilitasnya ditentukan oleh faktor di luar model. Evaluasi model pengukuran didasarkan pada tiga kriteria, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan (Hair et al., 2021).

a) Hasil Evaluasi Validitas Konvergen

Validitas konvergen diuji melalui nilai outer loading untuk menilai sejauh mana indikator merepresentasikan variabel laten dalam penelitian ini. Indikator dianggap valid apabila memiliki nilai outer loading lebih dari 0,7 (Hair et al., 2021). Berikut disajikan gambar beban faktor untuk setiap variabel.



Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

Gambar 1. Model penelitian Outer Model

Setiap indikator dalam penelitian ini memiliki nilai outer loading di atas 0,5, yang menunjukkan validitas yang memadai (Hair *et al.*, 2021). Nilai outer loading untuk setiap variabel disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Validitas Konvergen Menggunakan Outer Loading

	Penerapan SAKD	Transparansi	Akuntabilitas
PSAKD1	0,887		
PSAKD2	0,842		
PSAKD3	0,756		
PSAKD4	0,724		
PSAKD5	0,901		
PSAKD6	0,834		
PSAKD7	0,822		
PSAKD8	0,815		
TR1		0,772	
TR2		0,744	
TR3		0,709	
TR4		0,867	
TR5		0,754	
TR6		0,776	
TR7		0,736	
TR8		0,720	
AKT1			0,800
AKT2			0,905
AKT3			0,828
AKT4			0,740
AKT5			0,726
AKT6			0,765

AKT7	0,851
AKT8	0,793
AKT1	0,800

Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh indikator dalam variabel penelitian memenuhi persyaratan validitas konvergen. Evaluasi validitas konvergen dilakukan melalui outer loading, dan hasilnya menunjukkan bahwa setiap item pada masing-masing variabel memiliki nilai outer loading lebih dari 0,5, sehingga dapat dinyatakan valid.

b) Hasil Evaluasi Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan menilai sejauh mana hubungan antara suatu indikator penelitian dengan indikator lainnya tetap rendah. Salah satu metode evaluasi model luar adalah menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE), yang mensyaratkan setiap nilai melebihi 0,5. Nilai AVE untuk masing-masing variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Penerapan SAKD	0,680
Transparansi	0,580
Akuntabilitas	0,644

Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

Berdasarkan Tabel 4.9, setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang lebih besar dari 0,5, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, data dalam penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut.

c) Hasil Uji Reliabilitas

Untuk memastikan keandalan butir pertanyaan dalam penelitian, evaluasi reliabilitas konstruk dilakukan menggunakan *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Indikator dinyatakan reliabel apabila nilai keduanya $\geq 0,6$ (Hair *et al.*, 2021). Nilai *composite reliability* dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 5. Nilai Composite Reliability dan Cronbach's alpha

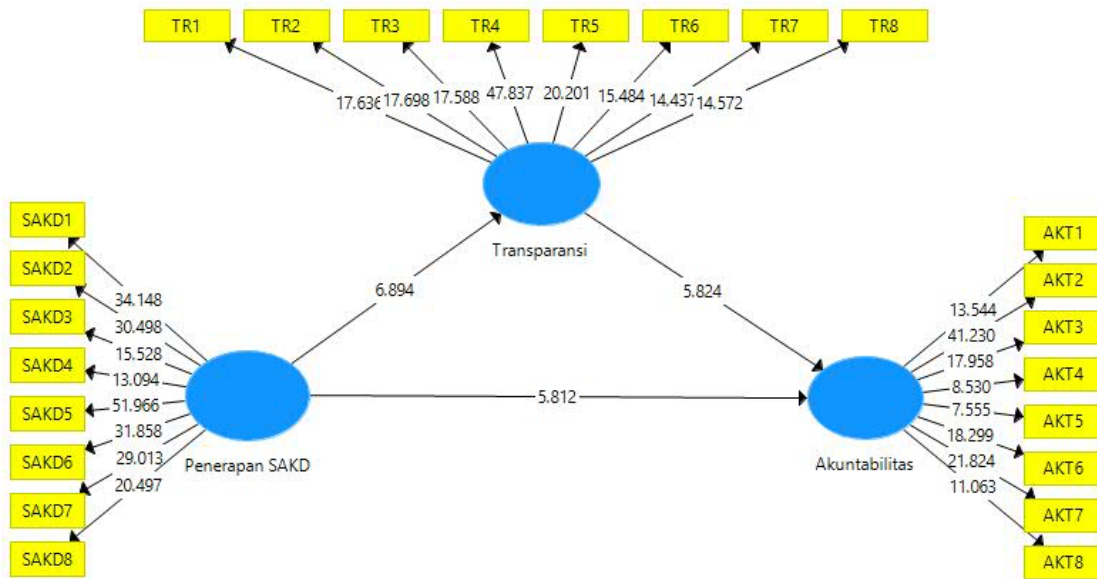
	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Penerapan SAKD	0,921	0,935
Transparansi	0,932	0,944
Akuntabilitas	0,896	0,917

Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,6 serta nilai *Cronbach's alpha* $>0,6$, maka setiap indikator variabel dan butir pertanyaan dapat dinyatakan reliabel.

2) Evaluasi Model Struktural

Pengujian model struktural mencakup uji kolinearitas, uji koefisien jalur, R-Square, dan Q-Square (Hair *et al.*, 2021). Hasil uji inner model melalui bootstrapping dapat dilihat pada Gambar 4.2. Berikut adalah hasil analisis inner model yang di gambarkan oleh gambar 4.2 dimana pada hubungan antara variabel merupakan angka t-statistik dan angka yang terdapat pada setiap indikator merupakan angka cross loading, berikut gambar inner model pada penelitian:



Sumber: Data diolah SmartPLS (2025)
Gambar 2. Hasil Bootstrapping

a) Uji Collinearity Statistic

Tabel 6. Collinearity Statistic (VIF)

	VIF
PSAKD1	4,468
PSAKD2	3,334
PSAKD3	1,991
PSAKD4	1,807
PSAKD5	5,213
PSAKD6	3,269
PSAKD7	3,014
PSAKD8	2,596
TR1	2,329
TR2	2,135
TR3	1,673
TR4	3,202
TR5	2,202
TR6	2,077
TR7	1,939
TR8	1,861
AKT1	2,170
AKT2	4,223
AKT3	2,913
AKT4	2,039
AKT5	2,046
AKT6	2,156
AKT7	2,968
AKT8	2,333

Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

Berdasarkan teknik pengukuran collinearity indicator, nilai VIF ≥ 5 mengindikasikan adanya multikolinearitas (Hair et al., 2019) Namun, hasil VIF pada tabel menunjukkan nilai dalam batas aman, sehingga tidak terdapat multikolinearitas antara indikator variabel persepsi risiko dan persepsi manfaat.

b) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi diukur menggunakan nilai R-Square, yang umum digunakan untuk mengevaluasi model struktural. Nilai R-Square berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi (Hair et al., 2019) Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai R-Square sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil R-Square

	R Square Adjusted
Akuntabilitas	0,495
Transparansi	0,267

Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

Berdasarkan Tabel 4.12, nilai R-Square Akuntabilitas sebagai variabel Y sebesar 0,495 dan Transparansi sebagai variabel Z 0,267 menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi akuntabilitas, variabel X dan Z yakni penerapan SAKD dan Transparansi memiliki pengaruh sebesar 49,5% dan dalam mempengaruhi variabel Z yakni Transparansi, variabel X yakni penerapan SAKD memiliki pengaruh 26,7% terhadap akuntabilitas, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

c) *Predictive Relevance* (Q^2)

Goodness of fit dinilai melalui Q-Square, yang setara dengan R-Square dalam regresi. Semakin tinggi Q-Square, semakin baik kecocokan model dengan data. Nilai predictive relevance dihitung berdasarkan rumus dari Hair et al (2019) dengan hasil perhitungan Q-Square sebagai berikut:

<p>Q-Square</p> <p>$= 1 - [(1 - R^2_1) \times (1 - R^2_2)]$</p> <p>$= 1 - [(1 - 0,495) \times (1 - 0,267)]$</p> <p>$= 1 - 0,370$</p>
--

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Q-Square sebesar 0,63 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 63% keragaman data, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki tingkat kecocokan yang baik.

d) Uji *Path Coefficient* (Uji Hipotesis)

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics*.

Tabel 8. T-Statistik dan P-Values

Hipotesis	Keterangan		T Statistics (O/STERR)	P- Values
H1	Penerapan SAKD -> Akuntabilitas	(+)	5,812	0,000
H2	Penerapan SAKD -> Transparansi	(+)	6,894	0,000
H3	Transparansi -> Akuntabilitas	(+)	5,824	0,000
H4	Penerapan SAKD -> Transparansi -> Akuntabilitas	(+)	5,027	0,000

Sumber: Data diolah *SmartPLS* (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 4.13, dari lima variabel yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti mendapatkan hasil untuk masing-masing hipotesis yakni:

1. Berdasarkan hasil analisis data, H1 didukung karena nilai T-statistik untuk H1 adalah 5,812 yang berada di atas batas minimum 1,96, serta nilai P-Value sebesar 0,00, yang dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan SAKD dalam hipotesis H1 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas sehingga hipotesis tersebut dapat diterima secara statistik.
2. H2 memperoleh dukungan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai T-statistik untuk H2 adalah 6,894, yang jauh lebih tinggi dari ambang batas 1,96, serta nilai P-Value berada di bawah 0,05. Dengan demikian, hipotesis H2 didukung dan variabel penerapan SAKD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa H3 didukung. Nilai T-statistik yang diperoleh untuk hipotesis ini adalah 5,824, yang menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan batas minimum 1,96, serta nilai P-Value yang lebih kecil dari 0,05. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 didukung dan variabel transparansi terhadap akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.
4. Selain itu, H4 penelitian ini juga didukung oleh data. Nilai T-statistik yang diperoleh adalah 5,027, yang berada di atas batas 1,96, serta nilai P-Value yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis H4 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan SAKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas melalui transparansi.

DISKUSI

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi

Berdasarkan Tabel 8, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi, dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 5,812 ($>1,96$) dan P-value 0,00 ($<0,05$), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, semakin baik penerapan SAKD di Badan Keuangan Kabupaten Tebo, maka transparansi keuangan juga meningkat. Hasil ini konsisten dengan **PP No. 71 Tahun 2010**, yang menekankan pentingnya sistem akuntansi yang relevan, andal, dan mudah dipahami untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Maria (2016)

juga menyatakan bahwa sistem akuntansi yang berjalan efektif akan meningkatkan akses dan pemahaman stakeholder terhadap informasi keuangan.

Secara teori, temuan ini sejalan dengan **Stewardship Theory** (Donaldson, 1991), yang memandang pemerintah sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. Transparansi menjadi bentuk akuntabilitas moral dan sosial, sebagaimana ditegaskan Dupe (2018). Penelitian terdahulu turut mendukung hasil ini. Studi oleh **Dian dan Ida (2018)**, **Aminah et al. (2020)**, dan **Darwis et al. (2022)** menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang baik meningkatkan transparansi. Secara internasional, **Al-Shammari & Al-Sultan (2021)** membuktikan bahwa akuntansi berbasis akrual di sektor publik Kuwait secara signifikan meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Lebih lanjut, studi **Adhikari et al. (2022)** di Asia Selatan dan **Bergmann & Labaronne (2023)** di Eropa menunjukkan bahwa transparansi fiskal bergantung pada sistem akuntansi publik yang kuat, terintegrasi, dan komunikatif. Dalam konteks Kabupaten Tebo, temuan ini memperkuat pentingnya sistem akuntansi yang tidak hanya administratif, tetapi juga mendukung keterbukaan informasi dan good governance.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam Tabel 8, nilai T-statistik sebesar 6,894 ($>1,96$) dan P-value $< 0,05$ menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan di Kabupaten Tebo. Semakin baik penerapan SAKD, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk mencerminkan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik secara transparan dan andal.

Secara teori, temuan ini diperkuat oleh **Stewardship Theory** (Donaldson, 1991), yang menyatakan bahwa pejabat publik bertindak sebagai pelayan kepentingan masyarakat, sehingga sistem akuntansi yang tertib menjadi sarana mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat dipercaya. Studi Lauwo et al. (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Penelitian Darwis et al. (2022) dan Aminah et al. (2020) juga menegaskan bahwa sistem akuntansi yang baik meningkatkan kualitas pertanggungjawaban sektor publik.

Dukungan internasional terlihat dari penelitian Santos et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual di Eropa meningkatkan akuntabilitas fiskal. Zidouemba dan Ondo (2023) menambahkan bahwa sistem akuntansi publik modern dapat mengurangi potensi korupsi melalui pencatatan yang transparan dan terdokumentasi. Selain itu, Alkhatib dan Harasheh (2021) menemukan bahwa integrasi teknologi dalam sistem akuntansi publik memperkuat pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dalam konteks Kabupaten Tebo, hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi telah menjadi landasan penting dalam membentuk budaya akuntabilitas keuangan pemerintah. **Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, terbukti dan dapat diterima.**

3. Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas.

Hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai T-statistik untuk H3 sebesar 5,824 ($>1,96$) dan P-Value $< 0,05$, menandakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas penyusunan laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar pula peluang terciptanya akuntabilitas publik. Transparansi sebagai bentuk keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat mendorong efektivitas pengelolaan dana publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menempatkan transparansi sebagai mekanisme pengendalian konflik kepentingan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat), sebagaimana dikemukakan oleh Putra dan Rasmini (2019).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rios et al. (2024), Lauwo et al. (2022), dan Christiaens et al. (2022) yang menegaskan bahwa transparansi fiskal mendorong akuntabilitas sektor publik serta memperkuat legitimasi institusional. Cohen dan Karatzimas (2023) menekankan pentingnya keterbacaan dan konsistensi laporan agar akuntabilitas benar-benar dipahami publik, sementara Bracci et al. (2021) menyatakan bahwa transparansi menjadi alat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Tebo, hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pelaporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas kelembagaan. **Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, dapat diterima.**

4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas melalui Transparansi.

Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai T-statistik sebesar 5,027 ($>1,96$) dan P-Value $< 0,05$, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Artinya, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas melalui transparansi sebagai variabel mediasi. Semakin baik sistem akuntansi yang dijalankan, semakin tinggi pula transparansi, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan, sebagaimana terjadi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Secara normatif, PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang relevan dan andal guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam perspektif teori keagenan, transparansi menjadi sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Putra dan Rasmini (2019) menyebut bahwa transparansi memberi ruang evaluasi kinerja oleh masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Penelitian ini didukung oleh temuan Rios et al. (2024), Lauwo et al. (2022), dan Kristiatuti (2020) yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkontribusi langsung terhadap kinerja pemerintahan dan pencapaian SDGs. Sementara itu, Manes-Rossi et al. (2022) menekankan bahwa transparansi berperan sebagai mediator yang signifikan antara sistem pelaporan keuangan dan akuntabilitas sektor publik. Penelitian Grossi et al. (2023) juga menyatakan bahwa sistem akuntansi yang transparan berfungsi sebagai sinyal ke publik tentang kesediaan institusi untuk diawasi. Hal serupa ditegaskan oleh Papi et al. (2021), yang menyebut bahwa tanpa transparansi, sistem akuntansi hanya menjadi formalitas administratif. Namun, sistem yang baik harus didukung oleh SDM yang kompeten agar pelaporan berjalan efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan kapasitas

aparatur juga diperlukan melalui pelatihan atau pengembangan keahlian teknis. **Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas melalui transparansi, terbukti dan dapat diterima.**

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di Badan Keuangan Kabupaten Tebo. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta transparansi juga berpengaruh terhadap akuntabilitas dan memediasi hubungan antara sistem akuntansi dan akuntabilitas. Temuan ini memperkuat pentingnya sistem akuntansi yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga mampu mendorong keterbukaan informasi sebagai landasan pertanggungjawaban publik. Implikasinya, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas sistem akuntansi dan keterbukaan informasi keuangan agar tercipta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Masyarakat juga didorong untuk lebih aktif mengawasi pengelolaan keuangan publik karena transparansi membuka akses terhadap informasi yang relevan. Bagi akademisi dan peneliti, hasil ini memberikan dasar empiris untuk mengembangkan kajian lebih lanjut tentang akuntansi sektor publik. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu instansi, menggunakan pendekatan kuantitatif, dan belum memasukkan variabel lain seperti budaya organisasi atau efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lintas instansi, menggunakan pendekatan mixed methods, serta menambahkan variabel lain seperti kompetensi SDM, teknologi informasi, dan kepemimpinan guna memperkuat analisis terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, P., Kuruppu, C., & Wynne, A. (2022). Public sector accounting in South Asia: A comparative analysis of reforms and their implications. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(6), 1234–1257.
- Alkhatib, K., & Harasheh, M. (2021). The effect of public accounting systems on financial reporting quality: The moderating role of IT integration. *International Journal of Public Sector Management*, 34(5), 455–474.
- Al-Shammari, B., & Al-Sultan, M. (2021). Accrual accounting implementation and transparency in public sector: Evidence from Kuwait. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(1), 1–20.
- Aminah, S., Herianti, E., & Utami, S. (2020). Pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 134–143.
- Bergmann, A., & Labaronne, D. (2023). Strengthening fiscal transparency in Europe: Role of integrated financial systems. *Public Money & Management*, 43(2), 95–104.
- Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2021). Public sector accounting, accountability and austerity: More than balancing the books? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(4), 845–872.
- Christiaens, J., Vanhee, C., Manes-Rossi, F., Aversano, N., & Van Cauwenberge, P. (2022). Readability and transparency of public sector financial reports: A cross-country comparison. *International Review of Administrative Sciences*, 88(1), 123–140.
- Cohen, S., & Karatzimas, S. (2023). Legitimacy through financial reporting: Evidence from municipal reports in Europe. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(2), 230–248.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dalimunthe, D. M. J. (2021). *Akuntansi sektor publik: Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah*. Medan: Graha Ilmu.
- Darwis, M. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 45–52.
- Darwis, M., Anwar, M., & Amiruddin, A. (2022). Sistem informasi akuntansi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 45–60.
- Darwis, M., Nuraini, N., & Suhartati, R. (2022). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 1–15.
- Dian, R. A., & Ida, R. (2018). Pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–282.
- Donaldson, L. (1989). The ethereal hand: Organizational economics and management theory. *Academy of Management Review*, 15(3), 369–381.
- Donaldson, L. (1991). The stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Donaldson, L. (1991). The ethereal hand: Organizational economics and management theory. *Academy of Management Review*, 15(3), 369–381. <https://doi.org/10.5465/amr.1991.4278960>
- Dupe, O. O. (2018). Transparency and public accountability in democratic governance. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 10(2), 20–27.
- Grossi, G., Papenfuß, U., & Tremblay, M. S. (2023). The transparency-accountability nexus in the public sector: A signaling theory perspective. *Public Performance & Management Review*, 46(1), 1–25.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2021). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kristiatuti, A. (2020). Penerapan sistem akuntansi pemerintah dan transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 12–20.
- Kristiatuti, D. (2020). Peran transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 6(1), 50–63.
- Kristiatuti, T. (2020). Transparansi sebagai mediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–55.
- Lauwo, S., Otusanya, O. J., & Bakre, O. (2021). Enhancing public accountability through accounting systems in public sector organizations. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(4), 511–534. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2019-0172>
- Lauwo, S., Otusanya, O. J., & Bakre, O. (2021). Corporate accountability and the politics of corruption: A critical discourse. *Critical Perspectives on Accounting*, 75, 102096. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102096>
- Lauwo, S., Otusanya, O. J., & Bakre, O. (2022). Transparency and accountability in the public sector: Evidence from developing countries. *Critical Perspectives on Accounting*, 86, 102416. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102416>

- Lauwo, S., Otusanya, O. J., & Bakre, O. M. (2021). Accountability and transparency in public sector financial reporting: A critical review. *Public Money & Management*, 41(4), 289–298.
- Lauwo, S., Nyuur, R. B., & Bakre, O. (2022). Fiscal transparency and anti-corruption reforms in Africa: A paradox? *Accounting Forum*, 46(2), 184–207.
- Lauwo, S., Otusanya, O. J., & Bakre, O. M. (2022). State accountability and sustainable development: Rethinking transparency and audit in public financial management. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(2), 177–195.
- Manes-Rossi, F., Cohen, S., & Tiron-Tudor, A. (2022). Financial reporting in the public sector: The mediating role of transparency for performance. *International Public Management Journal*, 25(3), 431–455.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik (Revisi ed.)*. Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, T. (2016). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(1), 45–53.
- Maria, E. (2016). Sistem akuntansi pemerintah dan transparansi keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1–16.
- Maria, T. (2016). Transparansi informasi keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 23–31.
- Nurkholis. (2019). *Akuntansi sektor publik: Teori dan praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Papi, L., Bigoni, M., Gnan, L., & Saliterer, I. (2021). Budgeting and accounting reforms in the public sector: Pathways to accountability? *Financial Accountability & Management*, 37(3), 251–272.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Pemerintah Kabupaten Tebo. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022. Tebo: BKD Kabupaten Tebo
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, I. M. A. W., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 2107–2134.
- Putra, Y. A., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(1), 59–71.
- Rios, M. A., Esteban, C. D., & Gonzalez, L. F. (2024). Transparency and accountability in local governments: A pathway to sustainable development. *Journal of Accounting and Public Policy*, 43(2), 106–120.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2023.106120>

- Rini, R. (2021). Evaluasi transparansi keuangan daerah dalam mendukung akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 95–104.
- Rios, A. M., Fernández-Izquierdo, M. Á., & Muñoz-Torres, M. J. (2024). Transparency and sustainability in the public sector: Evidence from global practices. *Sustainability*, 16(1), 411. <https://doi.org/10.3390/su16010411>
- Rios, P., Pérez, C., & López, A. (2024). Transparency and accountability in local governments: An empirical study. *International Journal of Public Sector Management*, 37(1), 42–59.
- Rizal, M. I., & Hermanto. (2019). Penerapan teori stewardship dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 22–30.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Santos, A. J., Gomes, R. C., & da Costa, E. M. (2022). Accrual accounting and fiscal accountability in European countries: An exploratory study. *Public Administration Review*, 82(5), 856–870.
- Suwarti, R. (2022). Agency theory dalam pengelolaan keuangan publik: Implikasi terhadap akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 110–119.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Zidouemba, P. R., & Ondo, R. F. (2023). Modern public accounting systems and corruption control: Evidence from West Africa. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(1), 77–94.